

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

OLEH:

**AIDIL FAJRI
NPM: 1303100055**

Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

PERNYATAAN



Dengan ini saya AIDIL FAJRI, NPM 1303100055 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau menganbil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2017

penulis

AIDIL FAJRI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Oleh:
AIDIL FAJRI
1303100055

Dipilihnya Kepariwisata sebagai objek penelitian karena sebagai salah satu jenis pendapatan daerah yang dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil. Pariwisata sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli daerah meskipun realisasinya masih baru maju dan berkembang. Kurangnya kesadaran masyarakat atas hadirnya pariwisata ini serta kurangnya fasilitas-fasilitas kenyamanan menjadi salah satu hambatan dalam mendorong pendapatan khususnya melalui Kepariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Qanun tersebut serta bagaimana cara mengatasinya dan memilih tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dalam rangka meningkatkan Pendaatan Asli Daerah dan juga untuk mengetahui faktor-faktor hambatan pelaksanaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif demi hasil yang di dapatkan melalui penelitian ini.

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Qanun nomor 13 tahun 2011 sudah cukup efektif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari laporan rekapitulasi target dan realisasinya menunjukkan bahwa realisasinya sudah cukup dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan pelaksanaan kebijakan pariwisata seperti tingkat kepedulian masyarakat akan kebersihan serta masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada juga sarana dan prasarana yang mendukung merupakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul: **Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kepariwisataaan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun secara materil serta doa. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada ke 2 (dua) orang tua penulis yaitu Ayahanda Tercinta dan Tersayang Muhammad Musa dan Ibu Tercinta dan Tersayang Mastuti, yang senantiasa membimbing dan mendo'akan saya tanpa henti selama saya menjalani perkuliahan sampai saya menyelesaikan skripsi.
2. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.Ap. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Kepada Bapak Affan Alquddus, S.Sos. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen FISIP terima kasih atas materi kuliah yang telah diberikan selama perkuliahan.
7. Kelapada seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
8. Kepada Bapak Aidil Yudi Irawan, SE.Ak. M.Si. Selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Dan Bapak P. Hardyanto, SE selaku kabid Pendapatan. Terima Kasih banyak karena telah bersedia menerima penulis untuk meneliti dan memberi informasi serta meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara penelitian.
9. Kepada Surkani SE, selaku Kabid dinas pariwisata narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yaitu yang telah meberi data dan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara penelitian.
10. Kepada Abang dan Adek-Adek Tercinta dan Tersayang Terima kasih atas Semangat dan Dukungan kalian.

11. Kepada teman seperjuangan Junaidi Siregar, Asli, Wahyudi, M. Habibi Musaradin, terima kasih untuk semua pengalaman, momen seni dan inspirasi selama perkuliahan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman Kos saya Pohan, mustaqim, dahnia, Dudi, Dedek, Ari, Kiting, terima kasih telah memberi saya semangat dalam mengerjakan Skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Kls A-1 Kebijakan Publik dan kawan seperjuangan stambuk 2013 IAN FISIP yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu Terima Kasih.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kauniannya. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2017

Penulis

AIDIL FAJRI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Pengertian Kebijakan.....	8
B. Pengertian Kebijakan Publik	9
1. Mekanisme Kebijakan Publik	11
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	13
3. Analisis Kebijakan Publik	13
C. Pengertian Implementasi	14
D. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	15
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
F. Tentang Pemerintah Daerah	17
1. Unsur-Unsur Pemerintah Daerah	17
2. Asas-Asaas Pemerintah Daerah	18
3. Otonomi Daerah	19
G. Pengertian Kepariwisata	24
1. Jenis-Jenis Pajak Dan Retribusi	26
2. Pengelolaan Pariwisata	28
H. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	30
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	34

B. Krangka Konsep	34
C. Definisi Konsep	36
D. Kategorisasi	37
E. Narasumber	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	39
H. Lokasi Penelitian	40
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian	40
1. Letak Dan Lokasi Penelitian	40
2. Tugas	41
3. Fungsi	41
4. Tujuan	42
5. Sasaran	42
J. Struktur Organisasi	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Narasumber	48
B. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Narasumber	50
1. Adanya Prosedur-Prosedur Yang Dilakukan Dalam Menjabarkan Keputusan Publik	50
2. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain	53
3. Adanya Mekanisme Perintah Dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik	54
4. Adanya Tujuan Yang Diambil Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik	56
C. Analisis Hasil Wawancara	58
1. Adanya Prosedur-Prosedur Yang Dilakukan Dalam Menjabarkan Keputusan Publik	58
2. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain	59
3. Adanya Mekanisme Perintah Dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik	60
4. Adanya Tujuan Yang Diambil Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Singkil	45
Tabel 3.2 Tarif Tempat Wisata.....	46
Tabel 3.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Table 3.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 3.5 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	49
Tabel 3.6 Distribusi Narasumber Berdasarkan Golongan Pangkat	49

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
A. Pengertian Kebijakan.....	8
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
C. Pengertian Implementasi.....	13
D. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	15
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	18
G. Pengertian Mukim	19
H. Pengertian Pembangunan Mental Spiritual.....	20
I. Pengertian Otonomi Daerah Khusus	21
J. Pengertian Peraturan Daerah/Qanun	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Krangka Konsep	28
C. Definisi Konsep.....	32
D. Kategorisasi.....	32
E. Narasumber	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data	36
H. Lokasi Penelitian	34
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian.....	34
1. Letak dan Lokasi Penelitian	34
2. Sejarah Singkat Pemerintah Mukim	35
3. Tugas, Fungsi, Tujuan Mukim	36

J. Struktur Organisasi.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Narasumber	41
B. Deskriptif Hasil Wawancara Dengan Narasumber	43
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan. Di samping itu pemerintah daerah diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip money follow function yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam menangani masalah pendanaan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam mengelola keuangan daerah dan daerah juga mempunyai kewajiban menanggung pembiayaan daerah sendiri. Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembanguana, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah ditingkat kabupaten/kota, murni digali dari daerah itu sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan prioritas daerah dalam

menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensinya dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ketahun. Salah satu sumber keuangan daerah yang diharapkan dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikabupaten aceh singkil adalah dengan sektor Kepariwisata. Dimana dalam rangka menunjang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pariwisata maka diperlukan suatu kajian dan perhitungan-perhitungan yakni seberapa besar kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dihasilkan.

Di kabupaten aceh singkil kewenangan atas pariwisata adalah kewenangan dari dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menerima pendapatan yang telah diatur sesuai dengan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Kepariwisata ini sebagai telah diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya juga dapat menimbulkan pembangunan yang maju di kabupaten aceh singkil. Contoh pendapatan yang ditimbulkan dari kepariwisataan ini adalah dengan datangnya para pengunjung/turis untuk berkunjung dan berekreasi menikmati pemandangan alam disana khususnya pemandangan bahari ialah bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD), karena retribusi merupakan salah satu sumber keugan yang sah yang menjadi kewenangan daerah untuk memungut, mengelola dan memanfaatkannya sesuai

dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Kabupaten Aceh Singkil terus berbenah diri agar sektor pariwisata dapat diandalkan sebagai salah satu sektor yang menghasilkan pendapatan daerah yang besar. Pertumbuhan pembangunan pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Singkil disikapi dengan positif oleh masyarakat lokal dan menganggap fenomena yang terjadi sebagai peluang emas yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Terkait dengan pariwisata saat ini jumlah wisata di Kabupaten Aceh Singkil. Adapun tempat wisata yang berada di kabupaten aceh singkil yaitu Pulau Palambak Kecamatan Pulau Banyak, pulau Tailana Kecamatan Pulau Banyak, Ujung Lolok/Pulau Tuangku Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Bangkaru Kecamatan Pulau Banyak, Air Terjun Lae Paris Kecamatan Danau Paris, Rawa Singkil Kecamatan Singkil, Pantai Pulo Sarok Kecamatan Singkil, Pantai Cemara Indah Kecamatan Singkil Utara, Air Terjun Lae Gecih Kecamatan Simpang kanan, Air Terjun Siompin Kecamatan Suro Makmur, Air Terjun Lae Petal Kecamatan Suro Makmur, Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu. Dan yang paling banyak dikunjungi para wisatawan baik itu domestik maupun manca Negara adalah di daerah Kecamatan Pulau Banyak.

Pada tahun 2015 jumlah wisatawan asing maupun domestik yang datang mencapai sekitar 10.729 wisatawan. Jumlah ini lebih sedikit bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang berkunjung hanya mencapai 16.665 wisatawan, dan tahun 2013 jumlah wisatawan

mencapai 15.248 wisatawan. Jumlah wisatawan domestik biasanya meningkat cukup signifikan pada bulan-bulan tertentu yaitu pada bulan yang memiliki liburan nasional. Sekitar 35,17 persen dari jumlah wisatawan manca Negara menginap di penginapan/hotel yang tersedia di Aceh Singkil. Sementara wisatawan lokal biasanya pulang kembali ke rumahnya ataupun menginap di rumah sanak saudaranya.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil daerah Kabupaten Aceh Singkil yang masih mengalami masalah dalam penerapan Implementasi Qanun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, akan penerapan pelaksanaan pariwisata yang baru berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah seperti tingkat Kepedulian masyarakat akan kebersihan yang dapat menyebabkan kurang kenyamanan ditempat wisata tersebut. Serta masih kurangnya fasilitas-fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di dalam tempat-tempat wisata tersebut. Hal ini yang perlu diteliti dalam Implementasi Qanun tentang Kepariwisata. Agar kiranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan guna pembangunan yang lebih maju.

Dari uraian diatas, maka masalah yang mau diteliti dalam penelitian dengan judul:

“ Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. ”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana upaya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil sudah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pariwisata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang dilakukan sesungguhnya akan diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata.
2. Untuk mengetahui upaya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pariwisata.

2. Manfaat Penelitian

1. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana mengelola pariwisata sesuai Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan.
3. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari: Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan,

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kepariwisata, Pengertian Pendapatan Asli Daerah.

BAB III : PERSIAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Terdiri dari: Metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber, Kerangka Konsep, Definisi konsep, Kategorisasi, Lokasi Penelitian, Tinjauan Ringkas Objek Penelitian, Struktur Organisasi.

BAB IV : DESKRIPSI ANALISIS HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran untuk kemajuan objek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

Budiardjo (2000:12) kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilihtujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sedangkan Imron Ali (2002:12) kebijakan adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada,yang di kenakan pada seseorang karna adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang bearti kebijakan adalah suatu kearipan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Menurut Solly, (2007:20) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara Friedrich (2004:10) Menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita

yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan berbuat atau tidak berbuat.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal hal yang diputuskan pemerintah untuk di kerjakan dan hal hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

Udoji (2004:13) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Sedangkan Jenkins (2004:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Richard (2005:7) Mengemukakan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegitan yang saling berhubungan dan

memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Sementara itu, Anderson (2006:7) memberikan definisi kebijakan publik yaitu: Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang di kerjakan dari pada apa yang di usulkan atau di maksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan

menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif. Secara Positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Kebijakan selain di buat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara Legislatif dan Eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah Undang-Undang Tingkat Nasional dan Peraturan Daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

1. Mekanisme Kebijakan Publik

William Dunn (2003) Suatu kebijakan publik memiliki mekanisme yang sistematis yang harus dilakukan secara tahap demi tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada.

- a. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Biasanya berjangka panjang tidak bisa diselesaikan oleh orang perorang dan memang harus diselesaikan.
- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pemimpin negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- e. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Wahab (2007:37) mengidentifikasi 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kebijakan publik:

a. Komunikasi (Communication)

Pelaksanaan kebijakan untuk memahami fungsi dan tugasnya. Implementasi dituntut dapat secara konsisten konsekuen berbuat dan bertindak sesuai apa yang menjadi tujuan yang ada.

b. Sumber daya (Resources)

Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagai mana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik itu menyangkut sumber daya manusia, dana dan fasilitas lainnya.

c. Sikap implementator (Disposition)

Implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila Implementatornya bersikap baik dan bersungguh-sungguh dan penuh rasa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

d. Struktur birokrasi (Bureaucratic structure)

Meskipun sumber daya sudah tersedia implementator sudah tau apa yang harus dilakukan atau memahami fungsi dan tugasnya. namun pelaksana juga masih diharapkan pada struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

3. Analisis Kebijakan Publik

Perbedaan analisis kebijakan dengan perumusan, implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam

perumusan kebijakan karena ia memberkan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

C. Pengertian Implementasi

Mazmanian (2007:7) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan Grindle (2007:23) menyatakan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan

secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan

Wahab (2007:45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Edward (2002:45) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai “out come” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “policy delivery system (Sistem penyampaian/penerus kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Sedangkan Anderson (2006:20) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa

implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Menurut konsep klasik perangkat administratif hanyalah perangkat pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijaksanaan, tetapi tidak begitu konteks apabila dilihat lebih lanjut dilapangan. Pendapat ini tidak seluruhnya benar. disamping sebagai implementator, birokrasi pemerintah juga memegang fungsi sebagai politisi. Hal ini tersebut dapat dilihat dari semakin dominannya birokrasi dalam perumusan kebijakan.

Dari penjelasan diatas, fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Wildavski (2004:13) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Majone (2004:10) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Meter (2004:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

F. Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan rayat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas daerah. menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.

1. Unsur-unsur Pemerintah Daerah

Menurut Hanif (2005:20) Unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu:

1. Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau Negara.

2. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
3. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum.
4. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya.
5. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Cirri-ciri pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara.
2. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan.
3. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi.
4. Adanya kemampuan untuk untuk menyediakan biaya yang diperlukan.
5. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.

2. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Fauzan (2006:69) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada dasarnya terdapat 4 (empat) asas-asas pemerintahan daerah yaitu:

1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat.

2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Tugas pembantuan yaitu pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintahan daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.

3. Otonomi Daerah

Kaloh (2005:15) secara *etimologi* otonomi berasal dari kata *oto* (*auto*=sendiri) dan *nomol* (*nomos*= aturan/undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna "memerintah sendiri" yang dalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut *local self government*.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradigm baru otonom daerah harus diterjemahkan Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrument untuk mencapai tujuan.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya-tidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Segi politik yaitu mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi bagian bawah.
2. Segi manajemen pemerintahan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Segi kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
4. Segi ekonomi pembangunan yaitu untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Gie (2006:57) mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil (pemerintahan daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga (otonomi) yaitu:

1. Untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang biasa membuka ruang bagi terjadinya tirani.
2. Sebagai upaya pendemokrasian.
3. Untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien.
4. Guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhususan yang menyertai setiap daerah.
5. Agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004:

1. Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang, dan

kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekuasaan daerah.

3. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Otonomi Daerah, yaitu:

- a. Sumber daya manusia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksanaannya. Sumber daya manusia pada pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat penting menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintahan Daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber daya manusia pada pemerintah disebut pegawai pemerintah daerah. pegawai pemerintah daerah adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah. pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. mekanisme sistem pemerintahan baik pusat maupun daerah hanya dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang dikehendaki apabila manusia sebagai subjek yang menggerakkan baik pula. tanpa manusia pelaksana yang baik, maka mekanisme pemerintahan akhirnya

tidak dapat berjalan dengan baik, dengan demikian tujuan yang diharapkan tidak akan terwujud.

b. Keuangan

Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah yang tersedia makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat di laksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolanya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.

c. Sarana dan Prasarana

Pengertian sarana dan prasarana disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintahan. Sarana prasarana tersebut meliputi alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi, dan sebagainya. apabila dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks pada abad teknologi modern sekarang ini alat-alat serba praktis dan efisien yang sangat membutuhkan. namun di lain pihak sarana dan prasarana yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang memiliki serta kecakapan manusia atau yang menggunakannya.

d. Organisasi dan Manajemen

Organisasi yang di maksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat,

kekuasaan tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. sedangkan yang dimaksud dengan manajemen manusia adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan usaha kerja sama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik maka di perlukan organisasi manajemen pemerintah daerah yang baik pula. manajemen pemerintahan yang baik tergantung kepada kepala daerah beserta stafnya dalam menggerakkan sarana dan prasarana seefektif dan efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan undang-undang.

G. Pengertian Kepariwisataan

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan masyarakat, pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah.

Pariwisata adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. Hal-hal yang berhubungan dengan wisata hendaknya memenuhi syarat sapta pesona pariwisata yaitu :

1. Aman

Wisatawan akan senang berkunjung kesuatu tempat apabila merasa aman, tentram, tidak takut, terlindungi dan bebas dari:

- a. Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan, dan lain sebagainya.

- b. Terserang penyakit menular dan penyakit bahaya lainnya.
- c. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik.
- d. Gangguan oleh masyarakat luar lainnya.

2. Tertib

Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang sangat di dambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua kehidupan masyarakat.

3. Bersih

Bersih merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat seperti:

- a. Lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum.
- b. Sajian makanan dan minuman bersih dan sehat.
- c. Penggunaan dan penyajian alat perlengkapan yang bersih.
- d. Pakaian dan penampilan petugas yang bersih

4. Sejuk

Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi, member suasana atau keadaan sejuk, nyaman dan tenang. Kesejukan yang di kehendaki tidak saja harus berada diluar ruangan atau bangunan, akan tetapi juga di dalam ruangan,

misalnya ruangan kerja/belajar, ruangan makan, ruangan tidur dan lain sebagainya.

5. Indah

Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap di pandang di sebut indah. Indah dapat dilihat dari segi, seperti srgi dari tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak siasi dan selaras, sehingga memberikan kesan yang enak dan cantik dilihat.

6. Ramah tamah

Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum, dan menarik hati.

7. Kenangan

Kenangan adalah kesan yang kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan menyenangkan.

1. Jenis-jenis Pajak dan Retribusi

Sonny (2009:1) pajak adalah kontribusi wajib pada Negara yang terhutang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan Negara dan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak dapat ditarik tentang kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkannya kontrak prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak) dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontrak prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontrak prestasi dari negara kepada pembayaran pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak yang dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksa, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa cirri-ciri yang melekat pada retribusi yaitu:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.

- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintahan daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata harus berdasarkan pada perencanaan yang matang. Perencanaan berarti memperhitungkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Perencanaan dan pengelolaan pariwisata berarti untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di masa akan datang. Oleh karena itu, kecenderungan pertumbuhan penduduk, persediaan lahan cadangan, pertumbuhan fasilitas dan kemajuan teknologi dengan penerapannya harus dimasukkan dalam perencanaan tersebut. Selain itu kualitas sumber daya pengelola pariwisata juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan industri pariwisata tersebut, sebab dalam pengelolaan pariwisata memerlukan keahlian dan pengalaman.

Soewarno (2002:378) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.

Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Tujuan perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang lebih lanjut demi meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang bisa tercapai seoptimal mungkin apabila pemerintah juga ikut berperan. Peranan pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata menentukan berkembang tidaknya suatu objek wisata. Berkembangnya tidaknya suatu objek wisata. Berkembangnya suatu kawasan wisata tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan melalui kerja sama stakeholder kepariwisataan, masyarakat dan pemerintah.

Yoeti (2002:285) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang dapat menentukan berhasilnya pengelolaan pariwisata sebagai industri, yaitu:

1. Tersedianya objek antraksi wisata.
2. Adanya fasilitas aksesibilitas.
3. Bernilainya untuk dikunjungi dan dilihat.

Objek wisata merupakan akhir perjaklanan wisata yang harus memenuhi syarat aksesibilitas, yaitu objek wisata harus mudah dicapai.

Dalam pengembangan kepariwisataan perlu diperhatikan kualitas lingkungan agar pengelolaan pariwisata tidak merusak lingkungan. Karena tanpa lingkungan yang baik tak mungkin pariwisata berkembang. Oleh karena itu pengelolaan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan,

sebab dalam industri pariwisata lingkungan itulah yang dijual. Dalam menunjang pengelolaan berbagai kegiatan kepariwisataan, teknologi manajemen perlu diterapkan agar sumber daya wisata yang murni alami dapat direkayasa secara berhasil guna sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya termasuk lingkungan alamnya.

H. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Bastian (2001:22) bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan akumulasi dari pos penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos penerima Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersal dari sumber ekonomi asli daerah. identifikasih sumber Pendapatan asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana yang sesungguhnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan Pendapatan asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa Pendapatan asli Daerah terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pada pasal 2 Ayat 2 pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkiran

2. Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada 31 negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa 31 negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau

karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

3. Perusahaan Daerah Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting dan selalu mendapat perlakuan khusus adalah perusahaan daerah. perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat:
 - a. Memberi jasa.
 - b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum.
 - c. Memupuk pendapatan.

Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat pada umumnya dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok

pemerintahan daerah. cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang menjadi modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah yang sah: Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

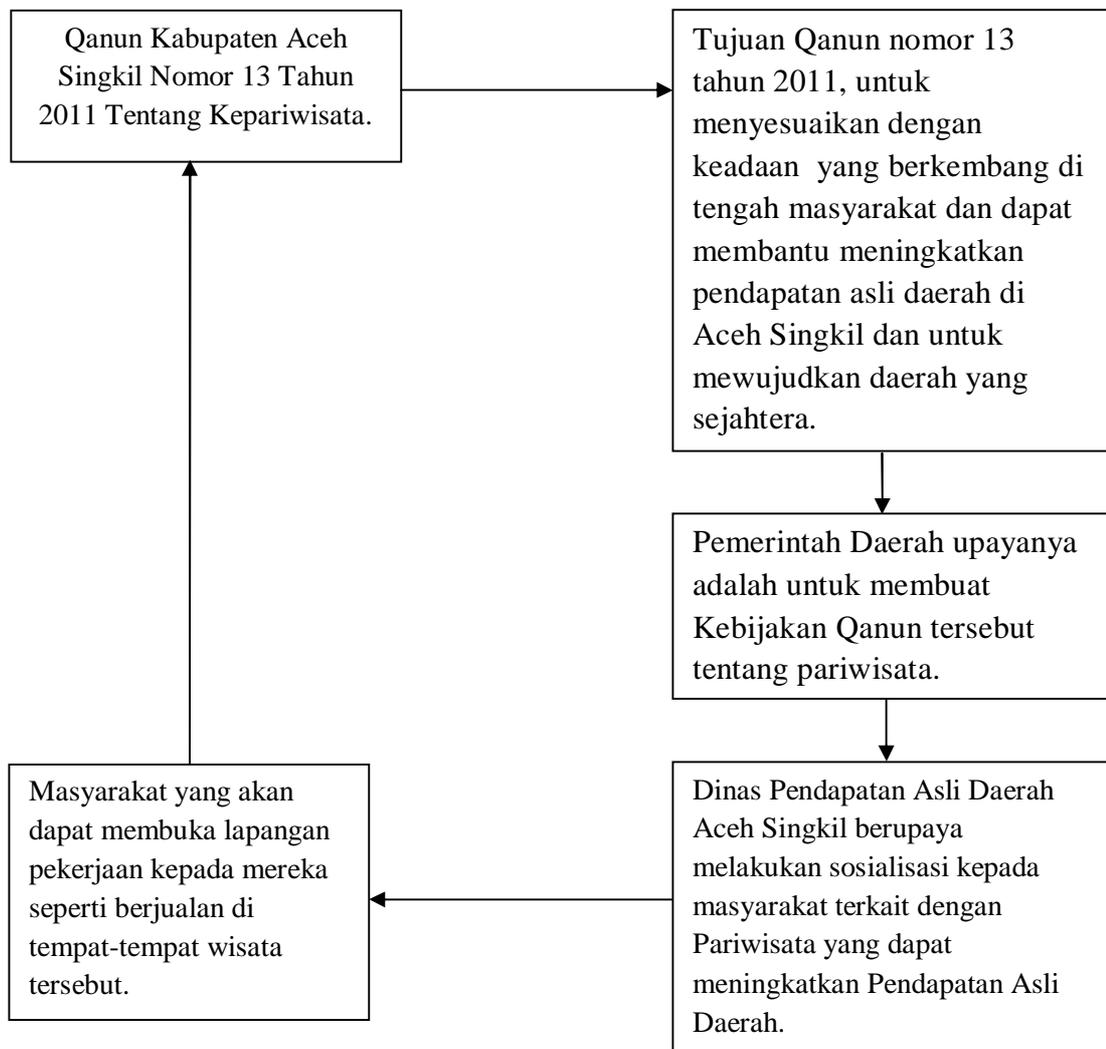
Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

B. Kerangka Konsep

Nawawi (2003:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini:



Gambar 3.1: Kerangka Konsep

C. Definisi Konsep

Nawawi (2003:43) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di kelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang di hadapi dan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
2. Kebijakan publik merupakan suatu hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah dan hal-hal yang yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
3. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

4. Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan policy delivery system atau sistem penyampaian kebijaksanaan.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menjabarkan keputusan publik.
- b. Adanya interaksi dengan organisasi lain.
- c. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.
- d. Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

E. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang, antara lain:

1. Tiga orang dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
 - a. Kepala dinas: Aidil Yudi Irawan, SE.Ak.MSi
 - b. Sekretaris dinas: HJ. Yusma, SH
 - c. Kabid pendapatan data dan informasi: Pridarma Hardyanto, SE
2. Dua orang dari pihak Disbudparpora:
 1. Kabid pariwisata: Surkani, SE
 2. Kasir pengembangan objek daya tarik wisata: Erfan Iskandar, SST

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara yakni:

1. Data primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

G. Teknik Analisis Data

Bodgan (2004 : 248) analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data Moleong (2004:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan

penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Jl. Singkil-Rimo No.5.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Letak dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung barat daya Provinsi Aceh, Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten ini adalah Kepulauan Banyak. Singkil merupakan Ibu Kota Kabupaten ini.

Terbentuknya Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan tanggal 20 April 1999. Makmur Syahputra SH, dilantik sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1999 oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilapangan Daulat Aceh Singkil. Secara geografis, Aceh Singkil terletak pada koordinat $2^{\circ}02' - 3^{\circ}0LU$ dan $97^{\circ}04' - 98^{\circ} 12'$ degan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas wilayah 3.578 km yang terdiri dari 15 Kecamatan, 23 Mukim dan 190 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk di Aceh Singkil adalah 154.516 jiwa. Kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

2. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

- a. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan, aset daerah dan investasi daerah.
- b. Menyiapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, aset daerah dan investasi daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan dan Pengelolaan daerah.
- d. Penyusunan laporan Keuangan daerah.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kuasa yang diinginkan Bupati.

4. Tujuan

- a. Meningkatkan keindahan dan pelestarian alam.
- b. Meningkatkan kualitas dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Meningkatkan kerja sama masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- d. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

5. Sasaran

- a. Jika pelaksanaan Kepariwisataaan berjalan dengan baik maka Pendapatan di Kabupaten Aceh Singkil akan sangat membantu dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Program Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisataaan ini telah dilaksanakan dengan baik, antara lain:
 1. Menambah pemasukan untuk Kas Daerah/PAD.
 2. Memperindah dan melestarikan alam yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
 3. Meningkatkan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian alam.

J. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu

dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten
Aceh Singkil

KEPARIWISATAAN	TAHUN	TAHUN
BULAN	2014	2015
JANUARI	841.275	961.484
FEBRUARI	841.275	961.484
MARET	841.275	961.484
APRIL	841.275	961.484
MEI	841.275	961.484
JUNI	841.275	961.484
JULI	841.275	961.484
AGUSTUS	841.275	961.484
SEPTEMBER	841.275	961.484
OKTOBER	841.275	961.484
NOVEMBER	841.275	961.484
DESEMBER	841.275	961.484
JUMLAH	10.095.300	11.537.808

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Tabel 3.2
Tarif Tempat Wisata

No	Nama Objek	Tarif (Rp)	Ket
1	Masuk Lokasi Tempat Rekreasi Pariwisata Pantai, Danau, dan Air Terjun - Pengunjung/pedagang - Kendaraan roda empat - Kendaraan roda dua	2.000,-/ orang 5.000,-/ orang 1.000,-/ orang	
2	Permainan Anak-anak	5.000,- / orang / 30 menit	
3	Perayu Dayung	5.000,- / orang / jam	
4	Perahu Layar / speedboard	1.000.000,- / unit / hari	
5	Sepeda Air	5.000,- / orang / jam	
6	Water Boom	10.000,- / orang	
7	Tabung Oksigen	25.000,- / orang / orang	
8	Fins (kaki katak)	5.000,- / pasang / jam	
9	Masker	5.000,- / unit / jam	
10	Bus Pariwisata	1.000.000,- / unit / hari	
11	Kendaraan anak-anak Tidak Bermotor	2.500,-/ unit / hari	
12	Masuk Lokasi Wisata Kepulauan	50.000,- / hari	
13	Tempat Bakar Ikan	2.500,- / unit / jam	
14	Pelampung	5.000,- / orang / jam	
15	Banana Boat	10.000,- / orang / jam	
16	Gedung Seni dan Budaya	150.000,-/ hari	
17	Tikar Santai	5.000,- / lembar / hari	
18	Karaoke	2.000,- / lagu	

19	Boya	5.000,- / hari	
20	Memancing	1.000,- / hari	
21	Lapangan Futsal	50.000,- / orang / jam	
22	Stadion	5.000,- / orang / jam	
23	Lokasi Pedagang / kuliner - Lantai Semen - Lantai Tanah	10.000,- / pertandingan	
24	Kebersihan Pedagang Tetap	10.000,- / hari penjualan	
25	Kebersihan Pedagang Musiman/Hari Besar - Pedagang Buah / Makanan - Pedagang Cenderamata	25.000,- / hari 15.000,- / hari	

Sumber : Data Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil

BABIV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yang tinggi yaitu Sarjana 1 dimanadengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%, Sarjana 2 dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20% dan Diploma 0 orang atau 0%

Tabel 3.5
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35 tahun	1	20 %
2	36-50 tahun	4	80 %
3	Jumlah	5	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber berusia 25-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, narasumber yang berusia 36-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80%

Tabel 3.6
Distribusi Narasumber Berdasarkan Golongan Pangkat

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	III/a	1	20 %
2	III/b	1	20 %
3	IV/a	2	40 %
4	IV/b	1	20 %
5	Jumlah	5	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat kita lihat bahwa responden berasal dari golongan pangkat III/a yaitu frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, untuk golongan III/d dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%, golongan IV/a dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 40%, golongan pangkat IV/b dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20%

B. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh singkil yaitu: Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendapatan, serta dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil Kepala Bidang Pariwisata, serta Kasir Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata.

1. Adanya Prosedur-prosedur Yang dilakukan Dalam Menjabarkan Keputusan Publik

Adanya prosedur-prosedur dari Qanun tersebut bertujuan untuk yang mengatur tentang Kepariwisataaan dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. hal tersebut dapat dilihat dari jawaban para narasumber yang berjumlah 5 orang menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Kepariwisataaan, yang dibicarakan di DPR dimana sebelumnya ada perencanaan setelah itu disahkan oleh Bupati sebelum masuk dalam lembaran Qanun. Proses dalam Qanun ini sudah mencapai dari yang diinginkan walaupun belum sempurna. Kendala sering terjadi pada Qanun seperti masih kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab

itu, apabila prosedur yang dilaksanakan harus benar-benar efektif dan juga keikutsertaan masyarakat akan Kepariwisata guna mencapai kesempurnaan dalam pencapaian Qanun tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh yang dilakukan pada hari senin 30 januari 2017 terhadap narasumber Bapak Aidil Yudi Irawan, SE.Ak.MSi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang mengetahui prosedur tentang Qanun No 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan dirumuskannya peraturan daerah tersebut untuk mengatur pendapatan melalui Kepariwisata, dimana sebelumnya dahulu dilakukan perencanaan dengan melibatkan dinas-dinas terkait salah satu adalah Dinas Disbudparpora yang kemudian disahkan oleh Bupati. Kendala yang dihadapi juga ada walaupun pencapaian Qanun ini belum sempurna tetapi sudah melaksanakan dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 31 januari 2017 terhadap narasumber lainnya yaitu Ibu Hj. Yusma, SH selaku sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, memberikan tanggapan tentang prosedur dalam Qanu tersebut hal pertama yang dilakukan perencanaan yang dibahas di DPR dan kemudian disahkan oleh Bupati Aceh Singkil. Kendala yang dihadapi seperti masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini, sehingga prosedur yang dicapai belum semaksimal yang diharapkan, masih membutuhkan proses yang lebih dalam lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu tanggal 1 februari 2017 terhadap narasumber Bapak Pridharma Hardyanto, SE selaku

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil memberikan tanggapannya mengenai bagaimana Prosedur suatu kebijakan ini dirumuskan dan kemudian menjadi acuan terhadap penyelenggaraan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Kepariwisata. Beliau menjawab bahwa kebijakan ini dirumuskan melalui pariwisata membuat konsep yang disampaikan kepada Bupati melalui Kabag Hukum yang disertai dengan aparatur lainnya yang terkait yang kemudian dibahas dan terbentuklah Qanun Nomor 13 tahun 2011 tentang Kepariwisata. Kendala dalam pelaksanaan Qanun ini pasti ada seperti kegiatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, meski begitu prosedur dalam Qanun ini sudah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana juga dengan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 yang dilakukan dengan narasumber Bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudparpora Kabupaten Aceh Singkil, mengatakan proses dalam Qanun ini adalah dengan kompetensi hukum kemudian dirujuk ke DPR yang kemudian disahkan oleh Bupati sebelum dimasukkan ke dalam lembar Qanun Nomor 13 Tahun 2011. Keberhasilan dari Qanun ini belum tercapai dengan sepenuhnya karena masih mengalami kendala.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 2 Februari 2017 yang dilakukan dengan Bapak Erfan Iskandar, SST selaku Plt. Kasir Pengembangan obyek Daya Tarik Wisata Disbudparpora Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan Adapun proses dalam Qanun tersebut pendapatnya

hampir sama dengan narasumber diatas, pencapaian Qanun ini belum terwujud sempurna walaupun prosedur yang ada sudah berjalan sebagaimana mestinya.

2. Adanya Interaksi Dengan Organisasi lain

Interaksi yang dilakukan dengan Organisasi lain harus ada guna mencapai kerja sama yang bagus dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah guna Pembangunan Daerah. Adapun Organisasi lain yang berinteraksi adalah seperti Dinas Pariwisata, meski disini ada kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 januari 2017 dengan narasumber Bapak Yudi Irawan, SE.Ak.MSi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dengan tanggapannya mengenai adakah upaya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya Kebijakan dalam pelaksanaan yang diberikan yaitu beliau menjawab ada, terutama terkait dengan Dinas Pariwisata, itu yang utama. Sedangkan Dinas-Dinas lain juga memiliki kaitan walaupun tidak secara langsung. Adapun saran yang diberikan adalah tidak terlepas dari kewenangan yang ada.

Berdasarkan wawancara pada hari selasa tanggal 31 januari 2017 dengan Ibu Hj. Yusma, SH selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil mengatakan bahwa jelas adanya kaitan dengan Dinas-Dinas lain. Kendala juga terdapat dalam interaksi ini yakni seperti keterlambatan dalam penerimaan laporan seperti surat setoran. Saran diberikan yaitu harus proaktif menjajaki ke lapangan dan ketelitian dalam memberikan laporan.

Menurut Bapak Bapak Pridharma Hardyanto, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan memberikan tanggapan kepada peneliti dengan wawancara pada hari rabu tanggal 1 februari 2017 memberikan jawaban adanya kaitan dengan Dinas lain terlebih dahulu melihat potensi yang ada dan Retribusi apabila fasilitas telah disediakan. Adapun saran yang diberikan adalah menyediakan dana yang ada.

Sebagaimana hasil yang dilakukan pada hari kamis tanggal 2 Februari 2017 Bapak Surkani. SE selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudparpora Kabupaten Aceh Singkil, menjawab bahwa Interaksi yang dilakukan dengan Organisasi lain adalah benar adanya dengan Dinas-Dinas lain yang terkait salah satunya BPKK. Kendala yang dihadapi ada pada masyarakatnya. Adapun saran yang diberikan adalah Pendapatan yang diperoleh dihitung lebih akurat lagi dan himbauan lagi kepada masyarakat.

Sementara dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 2 februari 2017 dengan Bapak Erfan Iskandar, SST selaku Kasir Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Disbudparpora Kabupaten Aceh Singkil, mengatakan bahwa Dinas yang melakukan Interaksi dengan Dinas-Dinas yang lain adalah salah satunya BPKK. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan kerja sama yang ada.

3. Adanya Mekanisme Perintah dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan Perintah dan Pengawasan atau Kontrol tidak terlepas juga kaitan pada Dinas yang lain selain pada Dinas yang bersangkutan tersebut yang mana pengawasannya dilakukan pada tiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 januari 2017 dengan Bapak Yudi Irawan, SE.Ak.MSi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, beliau memberikan jawaban bahwa adanya bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan Kebijakan Qanun yaitu dengan cara pengelolaan objek-objek wisata yang ada dengan melakukan pemantauan oleh Disbudparpora dan Inspektorat hal ini dilakukan agar petugas dilapangan dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini pariwisata agar keterlibatan masyarakat juga harus ada guna mencapai Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan daerah, yang mana pengawasan tersebut dilakukan pada tiap tahunnya. Adapun bentuk perintah yang dilakukan seperti koordinator pelaksanaan pengelolaan dengan Dinas-Dinas yang terkait dengan pemerintah setempat.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 31 januari 2017 Ibu Hj. Yusma, SH selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan bentuk perintah dan pengawasan dalam dinas ini ada, serta yang berperan dalam pengawasan ini adalah Disbudparpora dan Inspektorat yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Menurut hasil wawancara pada hari rabu tanggal 1 february 2017 terhadap narasumber Bapak Pridharma Hardyanto, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, menjawab sama dengan narasumber sebelumnya yaitu adanya perintah atau kontrol yang dilakukan dimana yang melakukan pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dari segi peraturannya serta pengawasan pelaksanaan dilaksanakan dalam bentuk pengambilan karcis masuk ke tempat wisata.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 2 Februari 2017 yang dilakukan dengan narasumber Bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudparpora Kabupaten Aceh Singkil mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Disbudparpora dan BPKK. adapun pengawasan yang dilakukan adalah dengan diaudit tiap tahunnya.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 2 februari 2017 dengan Bapak Erfan Iskandar, SST selaku Kasir Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata, Disbudparpora Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan bahwa perintah yang dilakukan berupa pengawasan yang diperhatikan di setiap tahunnya. Dinas yang berperan dalam pengawasan adalah Disbudparpora dan Inspektorat yang pengawasannya dilakukan setiap tahunnya.

4. Adanya Tujuan Yang Diambil Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik

Tujuan Implementasi Kebijakan disini adalah yang utamanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 30 januari 2017 terhadap narasumber Bapak Aidil Yudi Irawan, SE.Ak.MSi selaku Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Beliau memberikan jawaban bahwa adanya tujuan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2011, adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil yang telah disahkan oleh Bupati Aceh Singkil dan sudah ada langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam Kebijakan ini. Adapun hal-hal yang mendorong tercapainya Qanun ini adalah kerja sama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 31 januari 2017 terhadap narasumber lainnya yaitu Ibu Hj. Yusma, SH selaku sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan bahwa tujuan dari Qanun ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan Qanun yang sudah tercapai. Hal-hal yang mendorong dalam mencapai Qanun ini adalah sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 1 february 2017 dengan Bapak Pridharma Hardyanto, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah proaktif dalam melaksanakan Kepariwisata ini agar pembangunan di Aceh Singkil dapat lebih ditingkatkan lagi dan begitu juga pada masyarakat. Sedangkan tujuan dari Qanun ini adalah memperhatikan pariwisata lebih ditingkatkan lagi dengan hal-hal yang mendorongnya adalah adanya partisipasi masyarakat.

Sementara dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari kamis tanggal 2 Februari 2017 yang dilakukan dengan narasumber Bapak Surkani. SE selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudparpora Kabupaten Aceh

singkil, mengatakan bahwa Kebijakan ini dibuat salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pembangunan Daerah yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 dengan Bapak Erfan Iskandar, SST selaku Kasir Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata, Disbudparpora Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan bahwa tujuan dari Qanun ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga melestarikan alam dengan hal-hal yang mendorong kerja sama Pemerintah Daerah juga partisipasi masyarakat.

C. Analisis Hasil Wawancara

1. Adanya Prosedur-Prosedur Yang Dilakukan Dalam Menjabarkan Keputusan Publik

Pembahasan penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, hal ini ditujukan untuk lebih dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembuatan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata telah adanya proses yang dilakukan dalam menghasilkan keputusan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudi Irawan, SE.Ak.MSi dalam wawancara pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, yang mengetahui prosedur atau proses-proses tentang Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan

dirumuskannya peraturan daerah tersebut untuk mengatur pendapatan melalui Kepariwisata, dimana sebelumnya sudah dilakukan terlebih dahulu perencanaan dengan melibatkan dinas-dinas terkait salah satunya adalah Dinas Pariwisata yang kemudian disahkan oleh Bupati.

Seperti yang dikatan Wahab (2007:45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. oleh karena itu, telah tampak disini bahwasannya prosedur-prosedur yang sudah terbentuk dari Qanun tentang Kepariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Adanya Interaksi Dengan Organisasi lain

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil memiliki hubungan interaksi dengan organisasi lain dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten berusaha semaksimal mungkin menjalin kerja sama yang baik dengan organisasi lain baik langsung maupun tidak langsung agar tujuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terwujud dengan baik pula walaupun terkadang ada menghadapi kendala.

Seperti pada hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 januari 2017 dengan narasumber Bapak Yudi Irawan, SE.Ak.MSi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dengan tanggapannya mengenai apakah upaya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berinteraksi dengan organisasi lain dalam terwujudnya kebijakan dalam pelaksanaan yang diberikan yaitu beliau menjawab ada, terutama terkait dengan Dinas Pariwisata, itu yang utama. Sedangkan Dinas-Dinas lain juga memiliki kaitan walaupun tidak

secara langsung. Adapun saran yang diberikan adalah tidak terlepas dari kewenangan yang ada.

Begitu juga dengan hasil wawancara pada hari Selasa 31 Januari 2017 terhadap Ibu Hj. Yusma, SH selaku sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, berpendapat bahwa jelas adanya kaitan dengan Dinas-Dinas lain. Kendala juga ada terdapat dalam interaksi ini yakni seperti keterlambatan dalam penerimaan laporan seperti surat setoran. Saran yang diberikan yaitu harus proaktif menjajaki ke lapangan dan ketelitian dalam memberikan laporan.

Adapun interaksi dengan organisasi lain Menurut Majone (2004:10) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Pihak Dinas menyadari bahwa Implementasi Kebijakan Publik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya Interaksi dengan organisasi lain.

3. Adanya Mekanisme Perintah dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam bentuk Perintah dan Pengawasan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dinas ini telah melaksanakan perintah dan pengawasan tersebut bahkan pengawasan ada dari Dinas lain seperti Disbudparpora dan Inspektorat yang dilakukan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dengan narasumber Bapak Yudi Irawan, SE.Ak.MSi selaku Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, beliau memberikan jawaban bahwa adanya bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan Kebijakan Qanun yaitu dengan cara pengelolaan objek-objek wisata yang ada dengan melakukan pemantauan oleh Disbudparpora dan Inspektorat hal ini dilakukan agar petugas dilapangan dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pariwisata agar keterlibatan masyarakat juga harus ada guna mencapai Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan daerah, yang mana pengawasan tersebut dilakukan pada tiap tahunnya. Adapun bentuk perintah yang dilakukan seperti coordinator pelaksanaan pengelolaan dengan Dinas-Dinas yang terkait dengan Pemerintah setempat.

Sebagai mana hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa 31 januari 2017 terhadap Ibu Hj. Yusma, SH selaku sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan bentuk perintah dan pengawasan dalam Dinas ini benar ada, yang dilakukan pada setiap tahunnya. Pengawasan yang dilakukan agar menghindari konflik yang akan terjadi.

Dalam hal Perintah dan Kontrol atau pengawasan Menurut Wildavski (2004:13) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

4. Adanya Tujuan Yang Diambil Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik

Adapun tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli daerah dan juga melestarikan alam serta potensi alam yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, dengan melibatkan kerja sama dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan manusia yang ada.

Adapun hal-hal yang mendorong dalam mencapai Qanun tersebut yaitu dengan adanya kerja sama dengan masyarakat dengan Pemerintah Daerah, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, adanya partisipasi, serta potensi alam yang bagus merupakan hal-hal yang mendorong dalam tercapainya Qanun Kepariwisataan ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 30 januari 2017 dengan narasumber Bapak Yudi Irawan, SE.Ak.MSi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, beliau menjawab bahwa adanya tujuan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil yang telah disahkan oleh Bupati Aceh Singkil dan sudah ada langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kebijakan ini. Adapun hal-hal yang mendorong tercapainya Qanun ini adalah kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 31 januari 2017 Ibu Hj. Yusma, SH selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, beliau mengatakan bahwa tujuan dari Qanun

ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan Qanun yang sudah tercapai. Hal-hal yang mendorong dalam mencapai Qanun ini adalah sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 1 february 2017 terhadap narasumber Bapak Pridharma Hardyanto, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dalam menungkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah proaktif dalam melaksanakan Kepariwisataan ini agar pembangunan di Aceh Singkil dapat lebih ditingkatkan lagi dan begitu juga pada masyarakat. Sedangkan tujuan dari Qanun ini adalah memperhatikan pariwisata lebih lagi dengan hal-hal yang mendorongnya adalah adanya partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik dalam hal tujuannya Menurut Meter (2004:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 di Kabupaten Aceh Singkil tentang Kepariwisata sudah cukup baik dalam membantu Peningkatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten telah menetapkan target yang cukup baik. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu adanya prosedur-prosedur yang telah dilakukan dalam menjabarkan keputusan publik. Dalam hal adanya prosedur-prosedur yang telah dilakukan dalam Qanun No 13 tahun 2011 tentang Kepariwisata sudah masuk dan dijalankan ke dalam Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dengan baik di Kabupaten Aceh Singkil. Kedua, interaksi dengan organisasi lain adalah dimana Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten ada melakukan interaksi, dengan dinas-dinas terkait di Kabupaten Aceh Singkil. Yang ketiga, mekanisme perintah dan kontrol atau pengawasan dari pimpinan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik dimana Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten telah ada melaksanakan perintah dan pengawasannya. Keempat, tujuan Implementasi Kebijakan Publik yang diambil dalam hal ini adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa, dari keempat kategorisasi tersebut bahwa Implementasi Qanun No 13 tahun 2011 sudah ada dan berjalan dengan baik di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

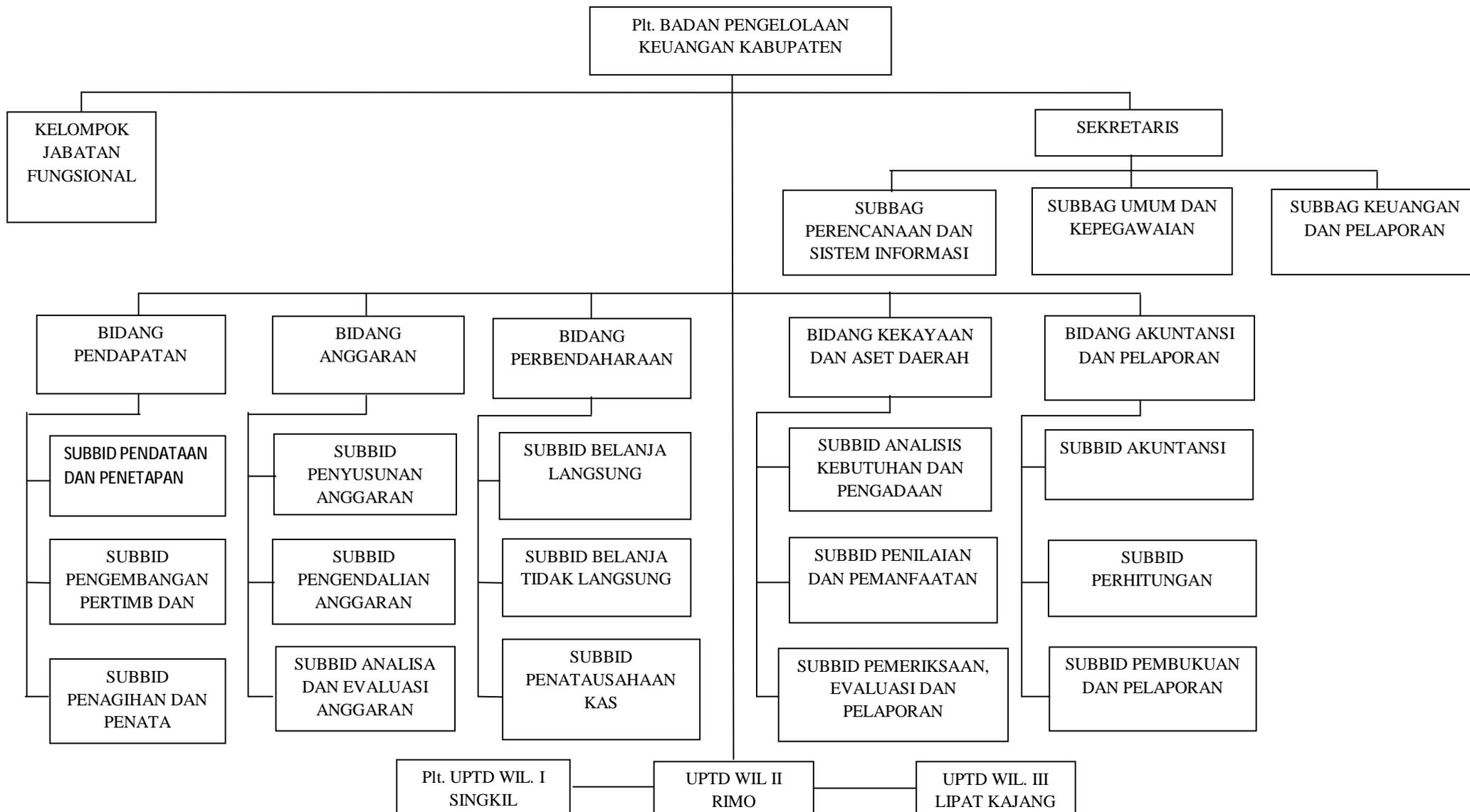
B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kepariwisata dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun Nomor 13 tahun 2011 tentang Kepariwisata.
2. Menyesuaikan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 tahun 2011 tentang Kepariwisata dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil sehingga diharapkan Qanun tersebut lebih berperan lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pihak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 13 tahun 2011 tentang Kepariwisata.
4. Meningkatkan sumber daya manusia dan mentalitas dari setiap pejabat Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil untuk lebih jujur, mempunyai rasa tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya, bersikap

abdi masyarakat, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pariwisata terutama hal kebersihan seperti tidak membuang sampah di tempat wisata dan melengkapi fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana yang ada untuk mengembangkan wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah .



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, 2001: *Analisis Kebijakan Publik*. Caps Yogyakarta.
- A, Yoeti, Oka, 2002: *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung.
- Bastian, Indra, 2001: *Akutansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Bodgan, Moleong, 2004: *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdyakarya, Bandung.
- Budiarjo, Miriam, 2000: *Dasar-Dasar ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Edward III George, 2002: *Kebijakan Publik*. Rosdakarya. Bandung.
- Friedrich, Carl, 2004: *Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Griendle, Merille S, 2007: *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps. Jakarta.
- Gie, The Liang, 2006: *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberti. Jakarta.
- Handayani, Soewarno, 2002: *Ekologi Pariwisata*. Angkasa. Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2005: *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Imron, Ali, 2002: *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jenkins, W.I, 2004: *Policy Analisis*. Oxford. Jakarta.
- Kaloh, Josef Riwu, 2005: *Pola Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Gramedia. Jakarta.
- Majone, G, 2004: *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah mada University press.
- Mazmanian, Daniel, 2007: *Implementasi*. Rosdakarya. Bandung.
- Meter van, 2004: *The Policy Implementation Process*. Conceptual Framework.
- Moleong, Lexy J. 2004: *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja

Rosdyakarya, Bandung.

Muhammad, Faujan, 2006: ***Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah***. Gramedia. Jakarta.

M. Solly, Lubis, 2007: ***Kebijakan Publik***. Mandar Maju. Bandung.

Nawawi, Hadari, 2003: ***Metode Penelitian Bidang Sosial***. Yogyakarta, Gajah mada University press.

Richard, Rose (Ed), 2005: ***Dasar-Dasar Kebijakan***. Yogyakarta, Gajah mada University press.

Sonny, 2009: ***Panduan Praktis Perpajakan***. Jakarta, CV. Andi Offset.

Udoji, Bahkan, 2004: ***Implementasi Kebijakan Pemerintah***. Gajah mada University press. Yogyakarta.

Wahab, Solihin Abdul, 2007: ***Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara***. Bumi Aksara, Jakarta.

Wildavski, A, 2004: ***Impelementasi***. Yogyakarta, Gajah mada University press.

William, Dunn, 2003: ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik***. Yogyakarta, UGM press.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang kepariwisataaan.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : **Aidil Yudi Irawan SE.Ak. M.Si**
Umur : **54 tahun**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Jabatan/Golongan : **Plt. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten**
Alamat : **Singkil Utara**

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Apakah ada proses kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Ada.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui seperti apa proses Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Terlebih dahulu adanya perencanaan, kemudian dirapatkan di DPR sebelum Qanun disahkan.

3. Apakah pelaksanaan proses Qanun Nomor 13 Tahun 2011 ada mengalami kendala?

Jawaban: Ada. Pada kegiatan masyarakat mensosialisasikan.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun Nomor 13 tahun 2011 sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

Jawaban: Sudah berjalan dengan baik. dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kaitan antara Dinas-Dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Pasti ada.

2. Menurut Bapak/Ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: semua instansi terkait dengan ini.

3. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Kendala, salah satunya sumber daya manusia.

4. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: T

C. Adanya Perintah atau Control

1. Menurut Bapak/Ibu Perintah bagaimanakah pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Adanya Dinas-Dinas yang terkait dengan pemerintah setempat.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Perintahnya seperti koordinator pelaksanaan Pengelolaan.

3. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Dinas Inspektorat.

4. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Setiap tahun.

D. Adanya Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

1. Apa tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang kepariwisataan?

Jawaban: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2011 sudah tercapai dengan baik?

Jawaban: Sebagian sudah berjalan dengan baik.

3. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

4. Apa peranan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam mencapai tujuan yang diinginkan?

Jawaban: Pelaksanaan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Nama : **H. Yusma, SH**
Umur : **53 tahun**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Jabatan/Golongan : **Sekretaris/ IV/b**
Alamat : **Pulo Sarok Singkil**

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Apakah ada proses kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Ada.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui seperti apa proses Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Terlebih dahulu adanya perencanaan, kemudian dirapatkan di DPR sebelum Qanun disahkan.

3. Apakah pelaksanaan proses Qanun Nomor 13 Tahun 2011 ada mengalami kendala?

Jawaban: Pasti ada, Terkendala.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun Nomor 13 sudah berjalan dengan baik dan dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Jawaban: Sudah berjalan. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

B. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kaitan antara Dinas-Dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

2. Menurut Bapak/Ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

3. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

4. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

C. Adanya Perintah atau Control

1. Menurut Bapak/Ibu Perintah bagaimanakah pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

2. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

3. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

4. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

D. Adanya Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

1. Apa tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang kepariwisataan?

Jawaban:

2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2011 sudah tercapai dengan baik?

Jawaban:

3. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban:

4. Apa peranan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam mencapai tujuan yang diinginkan?

Jawaban:

DAFTAR WAWANCARA

Nama : P. Hardyanto, SE
Umur : 52 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan/Golongan : Kabid Pendapatan
Alamat : Desa Ujung Singkil

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Apakah ada proses kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Ada.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui seperti apa proses Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Membuat konsep yang disampaikan kepada Bupati melalui Kabag Hukum setelah itu dibahas di DPR sebelum disahkan.

3. Apakah pelaksanaan proses Qanun Nomor 13 Tahun 2011 ada mengalami kendala?

Jawaban: Ada.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun Nomor 13 sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

Jawaban: Sudah. Walaupun belum semaksimal diharapkan.

B. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kaitan antara Dinas-Dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Pasti ada.

2. Menurut Bapak/Ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Hampir Semua terkait, seperti Dinas Pariwisata.

3. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Kendanya pada sarana.

4. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Pendapatan yang diperoleh harus dihitung lebih akurat lagi.

C. Adanya Perintah atau Control

1. Menurut Bapak/Ibu Perintah bagaimanakah pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Segi peraturannya, melalui Dinas ini ada juga pengawasan.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Benar-benar dijalankan oleh pihak yang berwenang.

3. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Inspektorat

4. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Dalam bentuk pengambilan karcis masuk tempat wisata.

D. Adanya Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

1. Apa tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang kepariwisataan?

Jawaban: Memperhatikan Pariwisata lebih lagi.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2011 sudah tercapai dengan baik?

Jawaban: Belum semuanya tercapai dengan baik.

3. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Adanya partisipasi masyarakat.

4. Apa peranan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam mencapai tujuan yang diinginkan?

Jawaban: Melakukan sosialisasi ke masyarakat.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Surkani, SE
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan/Golongan : Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Alamat : Bandes Pulo Sarok Singkil

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Apakah ada proses kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Ada.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui seperti apa proses Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Proses kebijakan Qanin

3. Apakah pelaksanaan proses Qanun Nomor 13 Tahun 2011 ada mengalami kendala?

Jawaban: Terkendala, karena masyarakat biasanya tidak dipungut pembayaran, tapi setelah ada Qanun tersebut belum terbiasa.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun Nomor 13 sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

Jawaban: Keseluruhan berjalan dengan baik meskipun disana sini masi ada kendala. Belum tercapai sepenuhnya.

B. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kaitan antara Dinas-Dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Ada, Dinas pendapatan daerah

2. Menurut Bapak/Ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Badan pengelolaan keuangan kabupaten, dan Inspektorat.

3. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: kendala, masi minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar sewa pada objek wisata yang telah ditentukan di Qanun ini.

4. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Seharusnya lebih aktif lagi dan harus banyak himbauan lagi ke masyarakat.

C. Adanya Perintah atau Control

1. Menurut Bapak/Ibu Perintah bagaimanakah pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Masih belum optimal

2. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Seperti adanya surat-surat perintah.

3. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Dinas Parpora dan Satpol PP

4. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Hari-hari besar/libur.

D. Adanya Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

1. Apa tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang kepariwisataan?

Jawaban: Retribusi tempat rekreasi, olahraga dan penginapan.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2011 sudah tercapai dengan baik?

Jawaban: Belum sepenuhnya.

3. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Semua pihak yang terkait.

4. Apa peranan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam mencapai tujuan yang diinginkan?

Jawaban: Penerimaan retribusi untuk PAD, dan membangun kesejahteraan yang lebih maju lagi.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Erfan Iskandar, SST
Umur :31 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan/Golongan : Plt. Kasir Pengembangan Obyek Daya Tarik
Wisata
Alamat :Hamjah Fansuri Pulo Sarok Singkil

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Apakah ada proses kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Ada.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui seperti apa proses Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Yang pastinya dibicarakan di DPR sebelumnya ada rencana terlebih dahulu baru kemudian disahkan oleh Bupati.

3. Apakah pelaksanaan proses Qanun Nomor 13 Tahun 2011 ada mengalami kendala?

Jawaban: Ada

4. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan Qanun Nomor 13 sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

Jawaban: Sudah. Dapat walaupun belum sepenuhnya.

B. Adanya Interaksi Dengan Organisasi Lain

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kaitan antara Dinas-Dinas lain yang terkait dengan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Cukup baik.

2. Menurut Bapak/Ibu siapa saja atau badan apa saja yang berinteraksi dengan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Trkait semua.

3. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Kendala. Pada masyarakat, karena masih banyak yang belum tau.

4. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Perlu ditingkatkan lagi kerja samanya.

C. Adanya Perintah atau Control

1. Menurut Bapak/Ibu Perintah bagaimanakah pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Diperhatikan setiap tahun.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk perintah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Berupa pengawasan.

3. Siapa saja yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Inspektorat, BPKK

4. Kapan sajakah waktu pengawasan pelaksanaan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Setiap tahunnya.

D. Adanya Tujuan Implementasi Kebijakan Publik

1. Apa tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang kepariwisataan?

Jawaban: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga melestarikan alam.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari Qanun Nomor 13 Tahun 2011 sudah tercapai dengan baik?

Jawaban: Belum juga.

3. Apa saja hal-hal yang mendorong dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 13 Tahun 2011?

Jawaban: Kerja sama Pemerintah Daerah juga partisipasi masyarakat.

4. Apa peranan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam mencapai tujuan yang diinginkan?

Jawaban: Penerimaan retribusi untuk PAD.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aidil Fajri

Tempat/tgl.lahir : 06 Agustus 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Kampung Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kababupaten
Aceh Singkil.

Anak ke : 3 (Tiga) dari 4 (Empat) Bersaudara.

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Musa

Ibu : Mastuti

Alamat : Kampung Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten
Aceh singkil.

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD N 4 Pulo Sarok Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2007, Berijazah.
2. Tamat SMP N 2 Singkil Kabuapten Aceh Singkil Tahun 2010, Berijazah.
3. Tamat SMA N 1 Singkil Kabupaten Aceh singkil Tahun 2013, Berijazah.
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2013 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

AIDIL FAJRI